



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 31 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR DAN
PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN

UNIT KERJA : DEPUTI BIDANG KOORDINASI INFRASTRUKTUR DASAR

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MUHAMMAD RACHMAT KAIMUDDIN
2. Jabatan : DEPUTI BIDANG KOORDINASI INFRASTRUKTUR DASAR
3. NHK : 876132

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp.

8.350.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 175 m2/250 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 2.800.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 175 m2/200 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000
3. Bangunan Seluas 90 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 429 m2/230 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASSAR , Rp. 650.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 180 m2/180 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 900.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 139 m2/100 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
7. Tanah Seluas 1.000 m2 di KAB / KOTA BULUKUMBA, Rp. 100.000.000
8. Tanah Seluas 1.000 m2 di KAB / KOTA BULUKUMBA, Rp. 100.000.000
9. Tanah Seluas 300 m2 di KAB / KOTA GOWA, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000



10. Bangunan Seluas 30 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 1.200.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	359.000.000
1. MOBIL, BYD M6 Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000		
2. MOTOR, POLYTRON FOX S Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 9.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	500.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	19.298.767.937
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	1.849.155.860
F. HARTA LAINNYA	Rp.	1.017.000.000
Sub Total	Rp.	31.373.923.797
III. HUTANG	Rp.	701.846.525
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	30.672.077.272

Catatan:

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.